

**EFEKTIVITAS DISEMINASI INFORMASI DI DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN DALAM MENDUKUNG
E-GOVERNMENT**

Junico Hara Tua Simatupang

NPP. 29.0130

Asdaf Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Administrasi Pemerintahan daerah

Email: junicosimatupang@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Researchers focus on the effectiveness of information dissemination in the Communication and Informatics Service of Asahan Regency in supporting e-governance, because there are still many people who do not know about e-government services and how to use these services. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and analyze the Effectiveness of Information Dissemination in the Communication and Informatics Service of Asahan Regency in supporting E-government. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Result:** Based on the findings of researchers in the field who use the quota sampling technique, there are still some communities, especially in villages that do not know about e-government services in Asahan Regency and there are still people who stutter technology. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the implementation of information dissemination in supporting e-government in the Communication and Informatics Service of Asahan Regency has been carried out well but is still ineffective because several indicators have not gone well. For the delivery of information dissemination is good and organized, good and quality websites and applications, as well as cost and time are quite efficient. There are still some shortcomings that need to be corrected and reorganized from several information dissemination media, be it internet media, print media, and other media. Especially for the quality of human resources that need to be trained and developed again.

Keywords: Effectiveness, Dissemination of Information, E-government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti fokus pada efektivitas diseminasi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam mendukung *e-government*, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait pelayanan *e-government* dan cara menggunakan pelayanan tersebut. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Diseminasi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam mendukung *E-government*.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penemuan peneliti dilapangan yang menggunakan Teknik quota sampling masih ditemui beberapa masyarakat khususnya di desa yang belum mengetahui tentang pelayanan *e-government* yang ada di Kabupaten Asahan serta masih ditemukan adanya masyarakat yang gagap teknologi. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah Pelaksanaan diseminasi informasi dalam mendukung *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan ini sudah terlaksana dengan baik tetapi masih kurang efektif karena adanya beberapa indikator belum berjalan dengan baik. Untuk penyampaian diseminasi informasi sudah baik dan tertata, *website* dan aplikasi yang baik dan berkualitas, serta biaya dan waktu yang cukup efisien. Masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditata kembali dari beberapa media diseminasi informasi baik itu media internet, media cetak, dan media lainnya. Terkhusus untuk kualitas SDM yang perlu dilatih dan dikembangkan lagi

Kata kunci: Efektivitas, Diseminasi Informasi, *E-government*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi berbasis elektronik erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang sering dikenal masyarakat dengan sebutan E-Government. Pengertian E-Government sendiri merupakan penerapan teknologi informasi berbasis elektronik oleh pemerintah setempat sebagai sarana komunikasi dalam memberikan informasi maupun pelayanan publik kepada masyarakat di bidang pemerintahan. Di Indonesia, inovasi-inovasi *e-government* ini telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Pengembangan *e-government* di Indonesia didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Melalui Instruksi Presiden Indonesia tersebut pastinya mengarahkan juga seluruh pemerintahan daerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, pembentukan *e-government* di tiap-tiap daerah diwajibkan untuk seluruh pemerintah daerah diseluruh Indonesia tak terkecuali kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara yakni Kabupaten Asahan. Dalam menyikapi hal itu kepala daerah atau Bupati Asahan membentuk Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang “penyelenggaraan *e-government* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan”. Dalam peraturan ini, *E-government* dilaksanakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, efisien, dan juga efektif dalam pelayanan publik, untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip ekonomi biaya ringan, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Penyelenggara *e-*

government di Kabupaten Asahan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi langsung dengan Perangkat Daerah, menyusun Rencana Induk *E-government* Daerah dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan juga berperan penting dalam diseminasi informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan *e-government* ini. Namun ada beberapa permasalahan sering ditemukan di lapangan yaitu masih banyaknya masyarakat yang hanya sekedar menerima informasi tanpa memanfaatkannya dan tanpa adanya umpan balik dari masyarakat terhadap informasi yang telah disampaikan tersebut. Ini menjadi satu permasalahan yang umum terjadi di daerah-daerah Indonesia. Maka dari itu memberikan kemudahan dalam hal penerimaan dan pengiriman proses komunikasi diperlukan kegiatan diseminasi informasi terhadap masyarakat. Diseminasi ini adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian inovasi, yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir, sikap dan tindakan individu-individu yang ikut terlibat didalamnya. Melalui kegiatan diseminasi diharapkan mampu untuk saling bertukar informasi, yang pada akhirnya dapat menciptakan inovasi-inovasi khususnya dalam pemerintahan daerah. Salah satu bentuk diseminasi informasi ini adalah dengan membantu pemerintahan daerah dalam penyampaian informasi terkait inovasi *e-government* yang ada didalam pemerintahan daerah dengan harapan masyarakat dapat menerima informasi tentang inovasi-inovasi tersebut sehingga terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang baik.

Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Sedikitnya ada beberapa poin permasalahan yang mungkin sering dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan salah satunya yaitu jarak antara pemerintah pusat Kabupaten Asahan dengan struktur pemerintahan dalam sektor kecil sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama untuk menempuhnya dimana dalam data BPS Asahan saat ini memiliki 25 kecamatan dan 204 desa/kelurahan definitif. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kesulitan dalam melaksanakan diseminasi informasi terkait *e-government* kepada masyarakat yang jarak daerahnya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Asahan, belum lagi sarana prasarana seperti infrastruktur jalan yang kurang baik di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya yang menjadi kendala adalah kurangnya sarana prasarana seperti fasilitas komputer yang cukup memadai di tiap kecamatan yang membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses internet. Permasalahan yang dialami oleh Diskominfo Kabupaten Asahan adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang informasi dan komunikasi publik. Itulah beberapa kendala dan permasalahan yang dialami pemerintah daerah melalui Diskominfo Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan *e-government* ini, belum lagi ditambah masih adanya beberapa masyarakat di beberapa pedesaan yang kurang paham akan teknologi informasi atau sering disebut GAPTEK (Gagap Teknologi). Dalam pelaksanaan *e-government* ini tentunya sangat membutuhkan akan pengetahuan teknologi untuk dapat menggunakan dan mengakses inovasi-inovasi terkait *e-government* ini, artinya inovasi *e-government* menjadi kurang efektif, karena sejatinya tujuan dari *e-government* ini adalah mempermudah seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, transparan, efektif, efisien, adil dan merata kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Asahan karena percuma saja inovasi *e-government* sudah baik tapi masyarakat belum paham menggunakan apalagi sampai belum mengetahui akan keberadaan inovasi *e-government* tersebut.

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam efektivitas pelayanan maupun tinjauan yuridis terhadap diseminasi informasi dalam *e-government*. Penelitian (Mega, 2018), Diseminasi informasi publik oleh humas kementerian kelautan dan perikanan dalam meningkatkan public awareness (Studi Kasus Pada Peraturan Menteri KKP No.2 Tahun 2015 Terkait Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)), (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta) dengan hasil penelitian dalam pelaksanaan diseminasi informasi ini sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan internet. Tata cara pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan diharapkan sosialisasi kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu penelitian (Risda, 2018), strategi diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo) dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat kec. malili kab. luwu timur (Universitas Negeri Alauddin Makassar) adapun metode dan hasil penelitiannya adalah menggunakan metode Penelitian Deskriptif kuantitatif, Hasil penelitian dari Risda adalah sebagai berikut: strategi yang dijalankan dalam diseminasi informasi adalah dengan strategi sosialisasi langsung kepada masyarakat. Penelitian selanjutnya oleh (Arif, 2019), efektivitas diseminasi informasi di perpustakaan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan jakarta menurut persepsi pengguna (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta). Tesis (Niko Bonar, 2020) Analisis Penerapan *E-government* Menuju Asahan Smart City (Universitas Sumatera Utara) Pada penelitian ini memfokuskan tentang *e-government* di Kabupaten Asahan dalam menuju Asahan Smart City dan penelitian ini berjenis Tesis. Dan penelitian (Tri Bery, 2018) Efektivitas Diseminasi Informasi Repository di Perpustakaan Universitas Negeri Padang (Universitas Sumatera Utara) menitikberatkan pada pelaksanaan diseminasi informasi yang terkait dengan repository pada perpustakaan Universitas Negeri Padang, yang kesimpulannya belum berjalan efektif karena ada beberapa indikator yang belum maksimal.

1.3. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian mega (2018) bertempat di Jakarta, sedangkan penelitian Risda (2018) berlokasi di Makassar, penelitian arif (2019) bertempat di Yogyakarta, Niko bonar (2020) di Kabupaten Asahan dan penelitian tri bery (2018) berlokasi di Padang. Untuk penelitian Niko Bonar adalah berjenis tesis. Selain itu penelitian terdahulu secara keseluruhan memiliki metode penelitian yang berbeda. Penelitian risda menggunakan teori strategi, penelitian arif dengan teori efektivitas sama dengan penelitian try beni dan untuk penelitian mega serta tesis dari penelitian niko menggunakan teori analisis atau lebih tepatnya menganalisis objek diseminasi informasi maupun *e-government*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berjudul Efektivitas Diseminasi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam mendukung *E-government*. dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Sehingga ada beberapa kebaruan yaitu dari segi lokus, metode penelitian dan permasalahan yang diselesaikan.

1.4. Tujuan.

Mengetahui dan menganalisa Efektivitas Diseminasi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam mendukung *E-government*. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Asahan dalam mengatasi faktor penghambat Diseminasi Informasi dalam mendukung *e-government*.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana Efektivitas Diseminasi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam mendukung *E-government*., termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang diambil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan serta beberapa masyarakat dari berbagai kalangan dan golongan yang ada di Kabupaten Asahan. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan Steers (Sumaryadi, 2005:107). Selain itu peneliti juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Efektivitas Diseminasi Informasi dalam Mendukung *E-government*

Efektivitas diseminasi informasi pada umumnya dapat dinilai dari beberapa aspek. Peneliti sendiri menggunakan teori dari Gibson dan Steers (Sumaryadi, 2005:107) dalam teori tersebut terdapat 4 dimensi yang mengukur efektivitas suatu program yaitu Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan. Kualitas merupakan hasil yang dihasilkan dari suatu organisasi baik berupa produk maupun jasa. Kualitas diseminasi informasi dilihat dari cara pegawai menyampaikan informasi dan kualitas dari informasi baik media cetak, media internet dan lainnya. Berdasarkan tiga indikator yang digunakan sebagai pengukuran dalam dimensi kualitas yaitu kualitas pelayanan, kualitas SDM(Pegawai) dan keterampilan, maka Diskominfo Kabupaten Asahan sudah memenuhi 3 indikator tersebut hanya saja masih kekurangan dalam segi kuantitasnya. Selanjutnya Efisiensi merupakan sebagai suatu cara yang dilakukan secara tepat yang dapat mengurangi waktu dan biaya dari kegiatan yang dilakukan. Dalam dimensi ini terdapat 2 indikator yaitu ketepatan waktu dalam pencapaian tujuan(aturan dan waktu) dan ketersediaan anggaran dalam diseminasi informasi. Dalam dimensi ini masih ada 1 indikator yang belum terlaksana dengan maksimal, indikator tersebut adalah ketepatan waktu dalam mencapai tujuan dikarenakan masih banyak masyarakat

belum tepat waktu dalam menerima informasi yang berkaitan dengan *e-government*. Selanjutnya yang ketiga yaitu Fleksibilitas adalah kemahiran atau kemampuan suatu organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang baru dan berbeda, sesuai permintaan masyarakat dengan satu indikator yaitu kemampuan menyesuaikan diri organisasi dalam segala bentuk perubahan yang ada dan Diskominfo Kabupaten Asahan suda memenuhi indikator tersebut. Dan dimensi yang terakhir adalah Kepuasan yang meruupakan Kepuasan merupakan sasaran kepada masyarakat terhadap kinerja atau *outcome* yang dirasakan masyarakat dengan harapan-harapan terhadap produk yang diterima masyarakat serta pertimbangan manfaat yang diterima oleh masyarakat, dalam dimensi ini terdapat 2 indikator yaitu tanggapan masyarakat mengenai pegawai atau pelaksana dan tanggapan masyarakat terkait media informasi. Untuk dimensi ini Diskominfo Kabupaten Asahan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat yang artinya sudah berjalan dengan baik.

3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Diseminasi Informasi dalam Mendukung *e-government*

3.2.1. Faktor Penghambat

Pelaksanaan sebuah kebijakan ataupun kegiatan tidak terlepas dari faktor penghambat yang sedikit banyak dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan atau kegiatan itu sendiri. Demikian hal nya dalam pelaksanaan diseminasi Informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kegiatan diseminasi informasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya keahlian SDM dalam melaksanakan diseminasi informasi

dari observasi yang dilakukan hanya ada beberapa pegawai yang paham akan teknologi informasi yang harus mengerjakan pekerjaan yang bukan di bidangnya. Kebutuhan SDM ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan diseminasi informasi karena di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dari segi kuantitas dalam SDM yang memahami atau ahli dalam teknologi informasi masih kurang. Kebutuhan ini menjadi sangat penting mengingat dalam perbaikan pemerintah melalui *e-government* harus diimbangi dengan pembangunan SDM yang secara umum dapat memahami teknologi secara umum apalagi di masa revolusi industri 4.0 ini.

2. Sarana prasarana

Selain faktor SDM, faktor lain yang menjadi kendala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan adalah sarana prasarana yang kurang memadai, baik itu sarana di Diskominfo sendiri maupun di lingkungan pemerintahan terkecil seperti kelurahan atau desa. Terbukti dengan tingkat konektivitas di beberapa desa masih sangat kurang dan jauh dari kata layak, ini disebabkan karena tower pemancar jaringan dalam suatu kecamatan hanya satu untuk beberapa desa, faktor lainnya juga adalah minimnya fasilitas komputer yang ada dan kurang memadai, banyak yang sudah tidak dapat digunakan karena terjadi kerusakan dengan berbagai alasan.

3. Pemahaman Masyarakat yang Masih Kurang, Pasif akan Informasi, Gaptak dan Faktor Sosial

Masyarakat adalah tujuan utama dilaksanakannya diseminasi informasi ini, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang pemahamannya kurang, pasif akan pelayanan yang diberikan bahkan tidak mau tahu sama sekali. Ini menjadi kendala yang cukup serius mengingat tujuan dari diseminasi informasi ini adalah penyebaran informasi dengan adanya perubahan pola pikir terhadap masyarakat namun masyarakat itu sendiri masih pasif dang kadang tidak peduli. Faktor lain yang ada dalam masyarakat sendiri adalah masih banyak masyarakat Gagap Teknologi atau tidak tahu sama sekali menggunakan teknologi yang ada padahal seharusnya di era digitalisasi saat

ini masyarakat juga harus dituntut bisa menguasai teknologi apalagi pemerintahan itu sendiri.

3.2.2. Faktor Pendukung

Pelaksanaan diseminasi informasi tidak akan lepas dari faktor pendukung yang mendorongnya. Hal mendasar yang mendorong terwujudnya *e-government* yang berkualitas dengan diseminasi informasi adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan Perkembangan Teknologi dengan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dunia Digital yang Semakin Canggih

Salah satu faktor pendukung yang harus diwujudkan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini adalah dimana adanya kesadaran masyarakat terhadap dunia digital ini, gunanya agar ada keseimbangan antara diseminasi informasi yang dilakukan dengan respon baik masyarakat terkhusus dalam mendukung *e-government* karena percuma saja semua aplikasi, pelayanan online sudah ditata dengan baik jika masyarakatnya belum sadar akan pentingnya digitalisasi

2. Anggaran Yang Memadai

anggaran untuk melengkapi sarana pra sarana yang sangat minim di beberapa titik desa, ketiadaan konektivitas jaringan disebabkan karna kurangnya sarana prasarana. Anggaran menjadi faktor pendukung dalam melengkapi sarana prasarana berupa alat teknologi untuk pelayanan diseminasi informasi baik itu dipusat maupun di beberapa desa yang sangat minim akan sarana prasarana dalam mendukung *e-government* di Kabupaten Asahan ini

3.3. Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan

Dalam penyelenggaraan diseminasi informasi untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan diseminasi informasi untuk mendukung *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal yang menjadi faktor penghambat diantaranya yaitu:

1. Memberikan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi dan Studi Banding ke Dinas Lain

upaya yang dilakukan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan diadakannya pelatihan bagi seluruh pegawai dan staff Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang berpotensi, upaya lain yang dilakukan adalah dengan meaksanakan studi banding ke Diskominfo daerah lainnya dengan tujuan dapat mengamati dan melihat apa saja kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan diseminasi informasi selama ini, serta mencoba meniru hal yang relevan dalam pelaksanaan diseminasi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dan dapat dijadikan pembelajaran kedepannya.

2. Penambahan Sarana prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan melakukan upaya yang cukup baik dengan mengajukan penyediaan anggaran untuk penambahan sarana prasarana dan melakukan koordinasi dengan OPD lainnya untuk ikut membantu dan berperan dalam diseminasi informasi guna mendukung terselenggaranya *e-government* dengan memperbaiki sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab OPD tersebut.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan melakukan upaya dengan sosialisasi dengan lebih mengedukasi masyarakat yang pemahamannya akan teknologi informasi ini masih kurang, Diskominfo juga coba menggandeng pihak lain yang memang berkompeten dalam mengedukasi masyarakat karna terbatas nya SDM yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Asahan. Sosialisasi yang dilakukan sangat penting dalam mewujudkan tanggung jawab dan komitmen Diskominfo Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada pelaksanaan seluruh program diseminasi informasi yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sudah bisa diatakan berjalan dengan baik namun dalam penerapannya masih menemui beberapa kendala pada dimensi kualitas dan efisien. Terbukti dengan adanya diseminasi informasi ini membuat Sebagian masyarakat Kabupaten Asahan dapat menggunakan dan memanfaatkan pelayanan *e-government* yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Hal tersebut juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh niko bonar dimana secara umum pelaksanaan *e-government* ini sudah berjalan dengan baik dengan adanya diseminasi informasi namun juga ditemui kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan internet dan hal ini menjadai tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menuju *smart city* yang telah diprogramkan (Niko Bonar Halomoan, 2020).

Layaknya program lain, diseminasi informasi ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah jaringan internet yang kurang memadai di berbagai lokasi desa, Selain adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan diseminasi informasi di Diskominfo Kabupaten juga ditemukan faktor pendukung yang membantu pelaksanaan diseminasi informasi antara lain adalah ketersediaan anggaran yang memadai serta pegawai yang memiliki keterampilan yang cukup baik. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh arif pelaksanaan diseminasi informasi di perpustakaan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan jakarta menurut persepsi pengguna menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih kurang efektif dengan hasil perhitungan efektivitas sebesar 76,3%. (Arif, 2019)

Kurang efektifnya pelaksanaan diseminasi informasi ini juga diakibatkan karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Asahan masih kurang maksimal karena masih terkendala dalam pelaksanaannya baik secara teknis maupun non-teknis. Harapan kedepannya dengan strategi diseminasi informasi ini dapat dikembangkan lebih baik lagi guna mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintahan agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pemerintahan yang berkualitas dan baik (Risda, 2018)

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan temuan terkait tentang penghambatnya pelaksanaan diseminasi informasi dalam mendukung *e-government* yang dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yaitu ternyata masih banyak masyarakat yang gagap teknologi ditemukan di beberapa desa yang masih belum memahami cara penggunaan teknologi informasi, faktor sosial yang dialami masyarakat sampai saat ini masih ada yang belum memiliki *smartphone*, yang dimana sangat dibutuhkan dalam penggunaan pelayanan *e-government* dan yang terakhir adalah kurangnya sarana prasarana yang cukup memadai, hambatan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan diseminasi informasi dalam mendukung *e-government* di Kabupaten Asahan.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan diseminasi informasi dalam mendukung *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan ini sudah terlaksana dengan baik tetapi masih kurang efektif karena adanya beberapa indikator belum berjalan dengan baik. Penyampaian diseminasi

informasi yang sudah baik dan tertata, *website* dan aplikasi yang baik dan berkualitas, serta biaya dan waktu yang cukup efisien. Masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditata kembali dari beberapa media diseminasi informasi baik itu media internet, media cetak, dan media lainnya. Terkhusus untuk kualitas SDM yang perlu dilatih dan dikembangkan lagi.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan diseminasi informasi untuk mendukung *e-government* adalah kurangnya keahlian SDM dalam melaksanakan diseminasi informasi yang mengakibatkan informasi monoton, sarana prasarana yang kurang memadai terkhusus konektivitas jaringan, komputer serta akses jalanan umum yang kurang baik dan jarak yang cukup jauh ke beberapa desa ditambah lagi dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang, gagap teknologi dan faktor sosial ekonomi tidak memiliki *smartphone*. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan diseminasi informasi untuk mendukung *e-government* adalah perlu adanya keseimbangan antara teknologi yang semakin canggih dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, dan juga faktor anggaran guna menambah sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diseminasi informasi untuk mendukung *e-government*.

Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam menghadapi hambatan pelaksanaan diseminasi dalam mendukung *e-government* adalah mengadakan pelatihan berbasis teknologi informasi kepada pegawai dan staff yang berpotensi serta melakukan studi banding ke dinas lain yang terkait untuk mengamati dan mencontoh hal yang baik. Upaya lainnya adalah dengan pengajuan anggaran untuk penambahan sarana prasarana khususnya konektivitas jaringan dan komputer serta melakukan koordinasi dengan OPD lain yang bertanggung jawab untuk mendukung *e-government* di Kabupaten Asahan. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap efektivitas diseminasi informasi di Kabupaten Asahan kurang maksimal dan juga informan masyarakat yang terlalu sedikit. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas diseminasi informasi dalam mendukung *e-government* sehingga bisa memberikan data yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asaha beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Selain itu untuk masyarakat yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods approach 4th Edition*. California: SAGE Publications.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sastropetro, Santoso, R.A. 1990. *Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Kapita Selekta Manajemen Sumber Daya Aparatur*. Bandung: Alfabeta.

———, 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Steers, Richard M. 1985. *Corporate Culture and Organization Effectiveness*. Canada: John Wiley and Sons.

———, 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkillisan, Hessel Nogi. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informaika Nomor: 10/per/m.kominfo/07/2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika

Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *e-government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan